



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KEPUTUSAN
NOMOR : 11 / Kpts / WN-ITe / III / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI INDERAPURA TENGAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari Inderapura Tengah berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Inderapura Tengah Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182
 7. Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun

21. 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 7);

22. Berita Acara Pembentukan Pengurus forum Anak Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 4 / PN.ITe/ III / 2022 tanggal 9 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercatum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ;
1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan
 4. sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. kordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster
- KETIGA : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
 5. Bidang Hubungan Antar Lemabaga Klaster V
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 9 Maret 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
 Nomor : 11 /Kpts/WN-ITe/III/2022
 Tanggal : 9 Maret 2022
 Tentang : PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
 INDERAPURA TENGAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

PENGURUS FORUM ANAK NGARI INDERAPURA TENGAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Kedudukan	Nama	Alamat (Kampung)	Pendidikan
1.	Penanggung Jawab	Desri Boy	Wali Nagari Inderapura Tengah	
2.	Pendampingan	1.Vera Enita, A.Md.Kep 2. Gusti Parnila, S.Pd 3. Roly Purnama Sari	Pasa Malintang Pasa Malintang Pasa Malintang	
		1. Rozi Winarni, S.Ners 2. Tisa Desmarini, S.Pd. AUD 3. Nada Nofindra, S.Pd 4. Noveiria Hamdalini, S.Pd	Cluang Cluang Cluang Cluang	
3.	Ketua Wakil Ketua	1.Muhammad Azkia 2. Utari Dewi Wahyuni	Tarandam Cluang	SLTA SLTA
4.	Sekretaris Wakil Sekretaris	1.Rahma Tiara 2.Habibie Ahmad Sunandra	Pasa Malintang Cluang	SLTA SLTP
5.	Bendahara Wakil Bendahara	1.Mutiara Hati 2. Fhatonah Puti Adipta	Cluang Cluang	SLTA SLTP
6.	Seksi-Seksi			
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1.M. Cherly Andreanhia 2. Azizah Rahma Putri	Cluang Pasa Malintang	SLTP SLTP
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1.Mardatillah Patricia Fefi 2. Zhioja Billia Efendi	Pasa Malintang Kampung Cluang	SD/MI SD/MI
	c. Bidang Kesehatan danKesejah teraan Anak	1.Moza Eisyah 2.Chelsia Nadiati Kholifah	Pasa Malintang Pasa Malintang	SLTP SLTP
	d. Bidang Pendidikan dan	1.M. Hanif Syafitri 2. Tegar Rabbani	Cluang Cluang	SLTP SLTA

	Pengembangan			
	e. Bidang Hubungan Antar Lemabaga	1. Aditya Maihendra 2. Chelsy Anggrainyha	Cluang Cluang	SLTP SLTP

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



(DESRI BOY)